

PEREMPUAN MADURA SEBAGAI SIMBOL *PRESTISE* DAN PELAKU TRADISI PERJODOHAN

Masyithah Mardhatillah

Aktivis Madura Migrant Care dan alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abstract

Maduranese women are generally considered as prestige symbol of society, family, even a man. By this reason, they are treated as well as possible to keep the prestige stable even higher. However in some degree, the treatment seems not totally advantageous for women in the sense that they have limited access to make various important decisions for their lives especially in choosing the spouse. Maduranese society still tend to choose arranged marriage for their daughters that the daughters don't have significant role in making any decision related with arranged marriage, engagement, even marriage itself. As the prestige maintainer, Maduranese female teenagers are also supposed to be in an engagement or marriage relationship as soon as they get the first menstruation. They all are the common tradition of Maduranese people which is also strengthened by some local wisdom well-alive in the society. In the other hand, this common rhythm of arranged marriage is in fact able to create a long-lasting marriage which is good for both, especially for women.

Keyword: Perempuan Madura, simbol prestise dan tradisi perjodohan.

Pendahuluan

Dibandingkan hal-hal lain, kekerasan atau praktik *carok* barangkali merupakan hal yang paling sering diidentikkan dengan masyarakat Madura. Ini merupakan suatu keniscayaan bukan hanya karena praktik semacam *carok* tidak dapat dengan mudah ditemui di wilayah-wilayah lain, akan tetapi karena *carok* sendiri memiliki berbagai kekhasan yang membuatnya berbeda, semisal bentuknya yang beragam dan evolutif namun khas, *ikon* celurit serta motif-motif yang melatarbelakanginya. Saking identiknya Madura dengan *carok* dan nilai-nilai kekerasan, hal-hal lain tentang Madura menjadi tidak banyak diketahui atau kurang diminati, termasuk tentang perempuan Madura yang ditengarai tidak jarang menjadi sebab terjadinya praktik *carok*. Persoalan tahta, harta (utamanya tanah dan ternak) dan wanita hingga hari ini masih dipercaya sebagai sebab paling

umum yang mengawali terjadinya *carok*.¹Terlepas dari benar tidaknya anggapan tersebut, perempuan dalam masyarakat Madura sebenarnya merupakan antitesis dari nilai kekerasan *carok* sebab ia merupakan simbol keindahan, kelembutan sekaligus ketangguhan dalam menjalankan peran sebagai seorang perempuan, istri, ibu, nenek hingga peran-peran dan atau berbagai profesi lain.

Perempuan juga merupakan bagian penting dalam struktur masyarakat Madura karena menjadi simbol *prestise* dan kehormatan sebuah keluarga. Tak heran jika kemudian ia begitu banyak dilekatkan dengan berbagai kearifan lokal masyarakat setempat yang tumbuh berakar dari generasi ke generasi. Seperti halnya kearifan-kearifan lokal lain, kearifan lokal pada Masyarakat Madura sedikitnya memiliki fungsi dan atau ciri sebagai penanda identitas sebuah komunitas, perekat kohesi sosial, unsur budaya yang tumbuh

¹ Abdul Hadi MW "Madura: Sejarah, Sastra dan Perempuan Seni" dalam <http://www.lontarmadura.com/madura-sejarah-sastra-dan-perempuan-seni-2/> Diakses pada 7 Desember 2014.

secara natural serta pengaruh pola pikir dan tingkah laku.² Pada masyarakat Madura, kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat utamanya begitu kuat mengarahkan pola pikir dan tingkah laku sehingga eksistensinya tetap bertahan kendati masyarakat bukan tak mengenal berbagai pola pikir hingga gaya hidup yang terbilang baru.

Keadaan yang demikian menempatkan perempuan Madura pada posisi yang dalam sebagian hal tampak cukup dilematis. Di satu sisi mereka diharapkan untuk bisa menjaga bahkan mengangkat martabat keluarga dan atau masyarakat secara luas, akan tetapi di sisi lain kebebasan dan ruang ekspresi mereka justru diarahkan sedemikian rupa, khususnya agar mengikuti arus utama dalam menjalankan dan melestarikan berbagai tradisi dan norma yang telah lama dianut masyarakat. Dalam beberapa hal, perempuan Madura tampak ingin diseragamkan dalam pola-pola proses maupun hasil yang diakui dan diterima masyarakat. Karena itu, dominasi keluarga dan atau tokoh masyarakat menjadi cukup besar dalam menentukan pilihan-pilihan yang berdampak besar bagi kehidupan mereka mulai dari persoalan pendidikan, pekerjaan hingga perjodohan dengan anggapan bahwa perempuan Madura sebaiknya dikawal dalam membuat keputusan-keputusan penting agar tidak salah memilih jalan. Dengan skenario semacam itu, perempuan Madura seakan-akan tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menciptakan dan menentukan alur hidup dan masa depan mereka sendiri.

Hal yang demikian utamanya begitu tampak dalam tradisi perjodohan di mana perempuan Madura umumnya 'diharuskan' menerima, menjalani sekaligus melestarikan berbagai tradisi yang telah mengakar di masyarakat. Mereka tidak sepenuhnya bebas memilih kapan dan dengan siapa mereka menikah serta cenderung menunggu lamaran dari pihak laki-laki atau inisiatif orang tua perihal perjodohan dengan calon yang bukan tak mungkin belum dikenal dan atau tak

sesuai dengan kriteria yang didambakan. Namun demikian, uniknya, kearifan-kearifan lokal yang bermain di balik perjodohan Madura semacam itu kadangkala menempatkan perempuan Madura justru pada posisi terhormat, mulia serta menguntungkan dalam hal fisik maupun non-fisik. Lagi-lagi, ini kembali berkait erat dengan posisi perempuan Madura yang menjadi simbol *prestise* baik bagi sebuah keluarga atau individu secara pribadi—yakni suami atau calon suami—sehingga perempuan akan diperlakukan dan dijaga sebaik mungkin.

Tulisan ini akan mencoba mengeksplorasi berbagai kearifan lokal masyarakat Madura dalam hubungannya dengan status perempuan Madura sebagai simbol *prestise* serta posisinya sebagai pelaku tradisi perjodohan dengan berbagai serba-serbi di dalamnya. Netralitas dan keberimbangan data serta analisis dalam tulisan ini diupayakan dapat menyajikan persoalan seapa adanya serta sekritis mungkin.

Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise (dalam Pernikahan)

Kekhawatiran seorang gadis akan menjadi perawan tua dan *ta' paju lake* (tidak ada lelaki yang melamar atau mau menikahi) bisa dibidang merupakan faktor utama tingginya angka pernikahan dini bagi perempuan Madura.³ Ini utamanya dirasakan orangtua dan keluarga, sehingga keputusan-keputusan berkait dengan sang gadis, mulai dari persoalan pendidikan hingga perjodohan dipengaruhi oleh pola pikir yang demikian. Apalagi, sebagian masyarakat Madura masih memercayai bahwa lamaran pertama terhadap si gadis akan menjadi pamali jika ditolak. Tak heran, perjodohan dan atau pertunangan perempuan Madura tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, akan tetapi sejak masa kanak-kanak bahkan ketika masih dalam kandungan, meski secara umum perjodohan biasanya diselenggarakan setelah si

² Fungsi yang demikian dikemukakan oleh John Haba dalam *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat*. Irwan Abdullah, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 9.

³ Miftahol Birri, "Otonomi Perempuan Madura dalam Perkawinan" *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 49. Bandingkan dengan A. Latif Wiyata, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 52.

gadis mengalami datang bulan (haid) pertama.⁴ Kendati pernikahan dilaksanakan belakangan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai dirasakan sebagian besar masyarakat, anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi para lelaki—yang kurang percaya diri untuk melamar—tetap membuat para orang tua buru-buru menikahkan anak gadisnya.⁵ Setelah menikah, orang tua pada umumnya akan merasa sebagian besar tugasnya telah selesai betapapun pada saat yang sama ia masih memiliki beberapa anak laki-laki lajang.

Minimal, orangtua akan merasa tenang jika anak gadisnya telah bertunangan. Tradisi pertunangan dalam masyarakat Madura sedikit berbeda dengan masyarakat Jawa yang umumnya mengenal istilah *lamaran* untuk menggambarkan prosesi *khitbah* dan terjadi beberapa bulan sebelum pernikahan. Dengan jarak waktu yang begitu dekat tersebut, sangat kecil kemungkinan rencana pernikahan mengalami kegagalan. Namun demikian dalam masyarakat Madura, pertunangan yang terjadi umumnya bukan untuk menandai telah dekatnya waktu pernikahan, akan tetapi lebih pada menandai ikatan antara seorang gadis dan lelaki.⁶ Hubungannya dengan *prestise*, lembaga pertunangan kemudian pernikahan dalam masyarakat Madura tidak hanya akan menyelamatkan dan menentukan *prestise* keluarga, akan tetapi juga *prestise* seorang lelaki sebagai tunangan ataupun suami, khususnya jika si (calon) istri juga merupakan masyarakat Madura.

Konsep *prestise* sebagai seorang lelaki inilah yang diduga melatarbelakangi terjadinya beberapa kasus kekerasan di Madura sebab hingga hari ini, masyarakat Madura secara umum masih memandang setiap bentuk gangguan terhadap tunangan atau istri sebagai pelecehan terhadap

harga diri laki-laki atau suami.⁷ Beberapa bulan lalu, misalnya, warga Madura digemparkan dengan penyerangan terhadap seorang sopir angkutan umum di keramaian kota hingga korban bersimbah darah tanpa ada seorangpun yang segera berinisiatif menolong. Berita menyebutkan bahwa persoalan perempuan menjadi sebab dalam kasus tersebut sebab si korban ditengarai menggoda (dan atau berhubungan dekat dengan) istri pelaku yang tengah ditinggal berlayar selama beberapa bulan.⁸ Konflik Sunni-Syiah di Sampang juga ditengarai bermotif perebutan seorang perempuan yang kemudian bercampur dengan konflik agama.⁹ Jika anggapan adanya motif perempuan di balik dua kasus tersebut benar adanya, ini lebih dari cukup menunjukkan bahwa perempuan Madura masih benar-benar menjadi simbol dari *prestise* laki-laki yang akan dijaga dan dipertahankan sedemikian rupa dengan berbagai cara.

Selain itu, jika benar demikian, keduanya juga menandakan bahwa peribahasa yang begitu terkenal di kalangan masyarakat Madura, yakni *lebbih begus pote tolang ebending pote mata* yang kurang lebih berarti lebih baik putih tulang (meninggal dunia) dibanding putih mata (tidak bisa melihat atau kehormatannya terlepas) masih tetap hidup dalam masyarakat. Nilai yang demikian berlaku tidak hanya pada pasangan yang telah atau masih hidup bersama, akan tetapi juga pada pasangan yang telah memutuskan untuk bercerai atau masih bertunangan. Untuk mendekati dan atau menikahi seorang janda, seorang lelaki harus meminta izin dulu dari bekas suami janda yang bersangkutan agar tidak dianggap menodai hak dan *prestise*-nya sebagai seorang lelaki Madura, kendatipun tersebut

⁷ A. Latif Wiyata, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri...*, 58.

⁸ <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/27/058617407/Goda-Istri-Orang-Sopir-Angkot-Dibacok-di-Jalan-Diakses-pada-07-Desember-2014>.

⁹ <http://www.surabayapagi.com/index.php?read~Tragedi-Sampang-Rebutan-Cewek;3b1ca0a43b79bdf9f9305b812982962f6733ce081884f319ff9175b83e78441> Diakses pada 07 Desember 2014. Analisis mendalam serta tawaran solusi yang representatif mengenai hal ini dikemukakan dalam Haryo Ksatrio Utomo, "Persamaan, Perbedaan dan Feminisme: Studi Kasus Konflik Sampang-Madura", dalam *Makara, Sosial Humaniora*, Universitas Indonesia Jakarta vol. 16 no. 2, Desember 2012. 123-134.

⁴ Miftahol Birri, "Otonomi Perempuan Madura dalam Perkawinan"..., hlm. 44-49. Birri bahkan mengatakan bahwa pertimbangan hanya dilakukan oleh keluarga si jejak dan tak ada pertimbangan apapun (khususnya untuk menerima lamaran) dalam keluarga si gadis.

⁵ Miftahol Birri, "Otonomi Perempuan Madura dalam Perkawinan"..., 45 dan 58.

⁶ Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura; Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Diceritakan Peribahasanya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007). 89.

sudah berakhir.¹⁰ Hal yang sama juga berlaku bagi perempuan yang telah bertunangan di mana ia harus benar-benar menjaga diri utamanya dalam pergaulan dengan lawan jenis. Herannya, dua hal ini bisa dibilang tidak berlaku bagi laki-laki yang berstatus duda atau tunangan orang.

Memegang posisi sebagai simbol *prestise* bagi keluarga maupun laki-laki yang demikian, perempuan Madura secara cultural dituntut untuk mematuhi berbagai aturan kesopanan hingga keutamaan mulai dari cara berpakaian, bertingkah laku, berbicara hingga bergaul dengan lawan jenis atau orang yang lebih tua. Dari situ, banyak orang tua yang mengirim putrinya untuk bersekolah di pesantren dengan harapan dapat memimba ilmu dan mengarahkan perilaku. Dalam sebagian hal, pilihan yang demikian cukup sukses membatasi ruang gerak perempuan Madura sehingga mereka memiliki kesempatan yang relatif lebih kecil untuk tampil di muka publik dalam *event-event* kesenian, penyaluran bakat dan minat atau pergelaran budaya lain utamanya yang seforum dengan para lelaki.¹¹

Hal di atas barangkali terkesan merugikan perempuan Madura dalam beberapa hal, akan tetapi menjadi simbol *prestise* sebenarnya juga menempatkan perempuan Madura pada posisi strategis. Ini misalnya tampak dari pendidikan seks sejak dini yang konon telah diajarkan pada perempuan Madura diiringi dengan perlindungan dan penjagaan yang ketat terhadap pergaulan mereka. Dengan *setting* yang demikian, ketika beranjak remaja, perempuan Madura dikenal memiliki pesona yang khas sebagai perempuan yang 'terjaga' dan 'suci' sedang sebagai seorang istri, mereka dikenal begitu 'perkasa' dalam hal seksualitas termasuk memastikan kesetiaan pasangan.¹² Hal tersebut tentu merupakan nilai plus tersendiri yang tak banyak ditemukan dari perempuan dengan kultur yang berbeda. Selain itu,

menjadi simbol *prestise* kadangkala membebaskan perempuan Madura dari tugas *breadwinning* atau mencari nafkah sehingga mereka memiliki kesempatan lebih untuk mengembangkan diri, melakukan hobi, memaksimalkan potensi maupun mengoptimalkan peran yang dimiliki sebab urusan *breadwinning* hampir sepenuhnya ditangani suami. Ini misalnya tampak dari kisah perempuan Madura yang belajar membuat batik ketika suami mereka tengah berlayar¹³ ataupun membantu menyiapkan peralatan dan distribusi hasil tangkapan ikan menjelang kepulangan suami. Selain menyalurkan hobbi dan mengembangkan diri, hal yang demikian tentu juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga. Mengenai peran perempuan dalam tugas *breadwinning*, lelaki Madura umumnya akan merasa lebih bangga jika sang bebas tangan dari urusan mencari nafkah, meski sebagian lain ada yang justru senang jika dibantu sang istri.¹⁴

Menjadi simbol *prestise* kadangkala juga memfasilitasi perempuan Madura untuk tampil secantik dan semenarik mungkin sebab baik keluarga maupun tunangan (atau suami) akan merasa malu jika anak, tunangan atau istri mereka berpenampilan terlalu sederhana atau tidak sama dengan orang kebanyakan. Karenanya, untuk momen-momen tertentu, mereka kerap disilakan berbelanja keperluan kecantikan mulai dari baju, aksesoris, kosmetik hingga perhiasan emas. Ini pulalah yang melahirkan anggapan bahwa perempuan Madura adalah toko emas berjalan sebab banyaknya perhiasan emas yang dipakai ketika mereka bepergian atau menghadiri sebuah acara.¹⁵ Meski pemandangan demikian tidak ditemukan di semua kalangan, pandangan bahwa penampilan seorang perempuan mencerminkan kesejahteraan ekonomi suami atau orangtua tetap hidup dalam masyarakat Madura. Dari situ, bentuk pengukuhan *prestise* tersebut bisa

¹⁰Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura; Pembawaan...*, 337.

¹¹Abdul Hadi MW "Madura: Sejarah, Sastra dan Perempuan Seni" dalam <http://www.lontarmadura.com/madura-sejarah-sastra-dan-perempuan-seni-2/> Diakses pada 7 Desember 2014.

¹²Abdul Hadi MW "Madura: Sejarah, Sastra dan Perempuan Seni" dalam <http://www.lontarmadura.com/madura-sejarah-sastra-dan-perempuan-seni-2/> Diakses pada 7 Desember 2014

¹³ <http://rona.metrotvnews.com/read/2014/11/03/313423/iwet-gambarkan-perempuan-madura-lewat-batik> Diakses pada 7 Desember 2014

¹⁴ Achmad Mulyadi, "Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat", *Jurnal Karsa STAIN* Pamekasan Vol. 19 No. 2 tahun 2011, 2-4.

¹⁵<http://www.warungbebas.com/2010/01/inilah-sifat-umum-etnis-orang-madura.html> Diakses pada 7 Desember 2014.

bermacam-macam dan berbeda bentuk sesuai selera dan kapasitas keluarga maupun suami, semisal fasilitas kendaraan, pendidikan, rumah, tempat usaha dan lain sebagainya.

Tentu saja, fasilitas yang demikian setara dengan tantangan dan 'beban' yang dipikul seorang perempuan sebagai simbol *prestise*. Ia diharuskan dapat menjaga kepercayaan dan nama baik keluarga maupun suaminya sebaik mungkin dengan cara menjaga perilaku, perkataan maupun sikap ketika bertemu dan berinteraksi dengan orang lain.¹⁶ Ini utamanya berlaku ketika si perempuan tengah menjalani masa studi atau kerja dan tidak bersama dengan keluarga ataupun pada saat ia telah menikah dan ditinggal sang suami berlayar atau merantau yang merupakan dua pekerjaan yang cukup dominan pada masyarakat Madura. Lain dari itu, perempuan Madura yang telah berstatus sebagai istri umumnya diharuskan mengabdikan pada suaminya sebaik mungkin kendatipun aplikasi dari kearifan lokal ini bisa bermacam-macam di setiap keluarga.

Fenomena Perjudohan dan Tahapan-Tahapannya

Dalam masyarakat Madura, sebuah pernikahan biasanya diawali dengan proses perjudohan kemudian pertunangan. Perjudohan berarti upaya menjodohkan seorang laki-laki dan perempuan dengan inisiatif pihak selain kedua calon mempelai,¹⁷ sedangkan pertunangan adalah peresmian pertama ikatan tersebut. Selanjutnya, jika tak ada aral melintang, pertunangan kemudian dilanjutkan dengan pernikahan yang merupakan proses akhir menyatukan dua orang dalam sebuah lembaga perkawinan. Tahapan-tahapan ini utamanya terjadi jika kedua calon mempelai sama-sama berasal dari suku Madura, baik mereka yang tinggal di wilayah Madura maupun di

daerah lain yang mayoritas didiami suku Madura seperti daerah-daerah Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Jember, Probolinggo, Lumajang dan Pasuruan.¹⁸ Meski belakangan proses pertunangan tak jarang dilewati atau dimodifikasi demi alasan efektivitas waktu maupun biaya atau dengan pertimbangan salah satu atau kedua mempelai dipandang telah cukup umur dan siap menikah, tahapan yang demikian tetap menjadi *mainstream* dan begitu populer di kalangan masyarakat Madura.

Mayoritas masyarakat Madura masih mencarikan atau menentukan calon pasangan hidup untuk anak gadis mereka sehingga dalam kasus-kasus demikian, hampir bisa dipastikan perjudohan terjadi tanpa persetujuan si perempuan yang bersangkutan dan hanya bermodal persetujuan keluarga dari dua belah pihak. Meski praktik yang demikian mulai ditinggalkan seiring dengan berubahnya pola pikir masyarakat, ini tak berarti bahwa perjudohan dalam masyarakat Madura benar-benar hilang. Begitu seorang anak gadis beranjak dewasa, orang tua atau bahkan keluarga besarnya akan mulai merasa gelisah jika belum ada keluarga atau oknum tertentu dari calon pasangan laki-laki yang melamar secara langsung atau sekadar menanyakan keberadaan si perempuan seperti yang lumrah dikenal dengan istilah *ngin-ngangin*.¹⁹ Faktor inilah yang kemudian

¹⁸ Daerah-daerah ini konon menjadi tujuan migrasi masyarakat Madura karena faktor lahan yang subur dan menjanjikan kesejahteraan ekonomi. Belakangan suku Madura yang tinggal di wilayah tersebut disebut Masyarakat Pandalungan. Ayu Sutarto, "Sekilas Tentang Masyarakat Pandalungan", dalam <http://www.lontarmadura.com/sekilas-masyarakat-pandalungan/>. Diakses pada 07 Desember 2014.

¹⁹ Masyarakat Madura umumnya memiliki rambu-rambu tersendiri dalam hal ini, semisal mencaritahu berita dan informasi mengenai seorang anak gadis melalui tetangga atau kerabatnya terlebih dahulu. Jika informasi mengenai perilaku, pendidikan, silsilah keturunan dan faktor-faktor lain dari si gadis dipandang baik, barulah pihak keluarga si calon laki-laki atau seorang oknum memberikan sinyalemen lamaran yang dikenal dengan istilah *ngin-ngangin* dan jika respon dari pihak perempuan dianggap positif, pihak laki-laki kemudian mengunjungi rumah si gadis dan secara resmi menyatakan maksud baik untuk menginisiasi perjudohan. Pihak keluarga si gadis dalam hal ini ada yang memberikan respon pada kunjungan pertama tersebut—baik positif maupun negatif—atau adakalanya masih meminta tenggang waktu untuk bermusyawarah dengan keluarga dan mempertimbangkan segala halnya. Jika kesepakatan berhasil dicapai, direncanakanlah sebuah upacara pertunangan dan atau pernikahan dalam waktu dekat.

¹⁶ Dardiri Zubairi, *Rahasia Perempuan Madura; Esai-Esai Remeh Seputar Kebudayaan Madura* (Surabaya: Andhap Asor dan Al-Afkar Press, 2013), 48.

¹⁷ Perjudohan yang demikian pada praktiknya lebih dikenal dengan istilah *nyabha'oca'* yang kurang lebih berarti dicapainya kesepakatan awal untuk menuju pada tahap peresmian dalam lembaga pertunangan. Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura; Pembawaan...*, 89.

memunculkan inisiatif untuk segera mencari jodoh bagi si anak gadis dari kalangan saudara atau sahabat dekat. Jika sudah ada lamaran untuk meminang sang gadis dalam sebuah pertunangan, kemungkinan diterimanya lamaran tersebut sangatlah besar. Lagi-lagi ini berkait erat dengan kedudukan perempuan sebagai simbol *prestise* keluarga di mana keberadaan perempuan yang sudah cukup usia untuk menikah tapi masih melajang atau belum bertunangan dianggap menjadi noda tersendiri bagi sebuah keluarga.

Perjodohan yang demikian adakalanya murni merupakan inisiatif dari pihak keluarga laki-laki atau merupakan hasil perundingan antara dua keluarga. Hanya saja, karena masyarakat Madura dalam sebagian hal masih patriarkis, pihak laki-laki hampir bisa dipastikan masih selalu menjadi subjek yang terlebih dahulu mengunjungi rumah si perempuan untuk menyampaikan niat baik secara resmi. Setelah mendapatkan respon positif, diresmikanlah sebuah pertunangan yang merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Dalam proses-proses tersebut, peran dan atau campur tangan anggota keluarga besar hingga tokoh masyarakat—kiai—hampir tak terhindarkan, mulai dari memberi saran dan arahan, memediasi kesepakatan antardua keluarga hingga meresmikan sebuah ikatan pertunangan.

Campur tangan yang demikian sebenarnya juga dialami lelaki (pemuda) Madura, hanya saja perempuan terbilang lebih sering mengalami hal tersebut.²⁰ Inisiatif keluarga mencari calon jodoh banyak dilatarbelakangi oleh pertimbangan menyambung kekerabatan²¹ hingga motif sosial dan ekonomi. Keinginan untuk tetap menjaga

hubungan darah atau pertemanan tidak jarang diwujudkan dalam sebuah perjodohan sehingga hubungan antaranggota keluarga dan atau sahabat diharapkan tetap dan akan semakin terjaga dengan baik dari generasi ke generasi. Meski beberapa kasus menunjukkan bahwa perjodohan dengan motif semacam ini rentan konflik dan perpecahan—khususnya jika pertunangan yang diresmikan kemudian tidak berlanjut pada pernikahan—, tidak sedikit masyarakat Madura yang masih mempraktikkannya. Adapun pertimbangan sosial dan ekonomi umumnya berkait erat dengan konsep *bibit bebet* dan *bobot* serta keinginan untuk menyambung keluarga dengan pihak lain yang status sosial dan ekonominya tidak jauh berbeda atau bahkan lebih tinggi. Masyarakat Madura secara umum masih menganggap bahwa memiliki calon menantu yang latar belakang keluarga menengah ke atas, misalnya, akan sangat mendongkrak martabat keluarga si perempuan.

Sementara itu, inisiatif seorang kiai terhadap sebuah perjodohan bisa jadi muncul dari sang kiai sendiri atau dari inisiasi orang lain yang (berkepentingan, dalam hal ini keluarga calon mempelai laki-laki) meminta bantuan sang kiai untuk menyampaikan maksud baik mengawali sebuah perjodohan. Karena posisi kiai yang begitu dihormati dalam masyarakat Madura,²² hampir bisa dipastikan bahwa tingginya probabilitas kesuksesan sebuah rencana perjodohan berbanding lurus dengan level *prestise* kiai yang bersangkutan. Orang tua dan keluarga si perempuan akan merasa sungkan atau rikuh jika kebaikan hati sang kiai tidak disambut dengan respon positif, sehingga perjodohan yang demikian hampir selalu berakhir sukses.

Praktik ini sebenarnya berkait erat dengan relasi kekuasaan dalam masyarakat Madura di mana kiai atau tokoh agama dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar.²³ Tak heran, saran

Adapun oknum yang dimaksud dikenal dengan istilah *pangada* . Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura; Pembawaan...*, 91.

²⁰Dalam hal ini, Ahmad Rifa'i menggambarkan gadis Madura sebagai *pereng bhelling* (piring pecah belaha) yang tidak akan kembali utuh setelah pecah, sedang perjaka Madura sebagai *pereng seng* (piring seng) yang bisa tetap dikembalikan bentuknya seperti semula setelah pecah. Karena itulah, dalam urusan jodoh, masyarakat Madura tidak ingin sembarangan memilihkan jodoh untuk anak perempuannya. Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura; Pembawaan...*, 307.

²¹Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura; Pembawaan...*, hlm. 306. Praktik tersebut dianggap berkait erat dengan peribahasa *mapolong tolang* yang begitu terkenal di masyarakat Madura. Miftahol Birri, "Otonomi Perempuan Madura dalam Perkawinan"..., 47.

²²<http://www.lontarmadura.com/kepemimpinan-informal-di-madura/>. Diakses pada 7 Desember 2014. Bandingkan dengan Latif A. Wiyata, *Madura yang Patuh? Kajian Antropologi mengenai Budaya Madura* (Jakarta: FISIP UI, 2003), 13.

²³Menurut Kuntowijoyo, seperti yang dikutip Abdul Hadi WM, kekuatan kyai semakin memperoleh legitimasinya dari pemimpin ritual keagamaan menjadi pemimpin sosial-politik menjelang abad ke-20 dan inilah yang barangkali turut mendukung

seorang kiai (dan atau istrinya yang biasa disebut nyai) begitu dianggap *legitimate* termasuk dalam hal perjodohan.²⁴ Masyarakat Madura kerap meminta saran atau pertimbangan seorang kiai untuk menginisiasi atau melanjutkan rencana perjodohan. Jika dengan berbagai cara—mulai dari yang halus hingga yang kasar—seorang kiai menyarankan agar rencana perjodohan tidak dilanjutkan, tak sedikit masyarakat Madura yang benar-benar melaksanakan usul tersebut bahkan tanpa pertimbangan-pertimbangan lain. Mereka juga tidak segan-segan *sowan* secara khusus pada satu atau beberapa kiai untuk berkonsultasi dan mencari solusi jika pernikahan sang anak tidak *sarmo* (harmonis) di awal-awal pernikahan. Rasa hormat dan *respect* yang demikian besar tersebut salah satunya dilatarbelakangi anggapan bahwa kalangan kiai merupakan golongan yang dekat dengan Tuhan sehingga dipercaya memiliki daya *kasyaf* untuk membaca dan atau memprediksikan hal-hal yang tidak bisa ‘diakses’ kebanyakan orang. Dari situ, dapat dibayangkan bagaimana ‘tersanjung’nya masyarakat Madura jika seorang kiai justru berinisiatif memilihkan jodoh untuk sang anak. Kurang lebih, ketundukan terhadap kiai juga merupakan salah satu wujud religiusitas orang Madura yang ditopang oleh anggapan bahwa kiai adalah orang yang lebih religius sehingga saran dan masukannya patut untuk sangat dipertimbangkan.

Perempuan Madura sebagai pihak yang akan menjalani pertunangan kemudian pernikahan tersebut, di sisi lain, justru hampir tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan-pertimbangan dari dua keluarga dan atau saran dan masukan dari kiai dianggap telah cukup sehingga persetujuan si perempuan dirasa tidak terlalu diperhitungkan. Karenanya, tidak sedikit perempuan Madura yang mengaku

fenomena ini. Abdul Hadi MW “Madura: Sejarah, Sastra dan Perempuan Seni” dalam <http://www.lontarmadura.com/madura-sejarah-sastra-dan-perempuan-seni-2/> Diakses pada 7 Desember 2014. Bandingkan dengan Abdur Rozaki, “Kepemimpinan Informal di Madura”, dalam <http://www.lontarmadura.com/kepemimpinan-informal-di-madura/> Diakses pada 7 Desember 2014.

²⁴ Jamal D. Rahman, “Sesisir Pisang Kiai: Sedikit tentang Kosmologi Madura”, dalam <http://www.lontarmadura.com/?s=sisir&x=0&y=0> Diakses pada 7 Desember 2014.

baru mengetahui perjodohnya telah diresmikan dalam sebuah lembaga pertunangan setelah pertunangan tersebut terjadi. Kendati begitu, belakangan, perempuan Madura kerap kali dilibatkan dalam pengambilan keputusan meski seringkali mereka tidak benar-benar merdeka dalam menyuarakan keinginan. Mereka cenderung hanya diberi informasi tanpa benar-benar diberi ruang untuk berunding dan menyatakan pendapat. Ini utamanya terjadi ketika perjodohan yang dialami berawal dari inisiasi seorang kiai atau jika keluarga yang hendak melamar adalah keluarga, sahabat dekat atau memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam kasus pertama, mereka dituntut untuk menghindarkan orangtua dan keluarga besarnya dari rasa sungkan karena tidak mengikuti saran kiai, sedang dalam kasus kedua, mereka umumnya berusaha menghindarkan diri dari anggapan ‘jual mahal’ dan atau ‘terlalu pemilih’. Ada juga pertimbangan lain, seperti keinginan untuk berbakti dan patuh pada orang tua serta tidak *neko-neko* seperti yang dialami Fitriana Utami Dewi ketika ia tidak punya pilihan lain selain manut terhadap keputusan yang telah dicapai keluarganya dan keluarga (mantan) calon suaminya.²⁵

Pertunangan semacam ini tetap menjadi pilihan utama masyarakat Madura hampir di semua kalangan dengan berbagai pertimbangan utamanya untuk menemukan kecocokan antarcalon mempelai sebelum melangkah pada jenjang yang lebih serius. Namun demikian, karena pertunangan bukanlah jaminan terjadinya sebuah pernikahan mengingat masyarakat Madura juga mengenal tradisi *gagalnya pertunangan*, tidak sedikit perempuan Madura yang segera dinikahkan tak lama setelah kesepakatan dua keluarga tercapai atau diresmikannya pertunangan, utamanya mereka yang dipandang telah cukup umur. Kasus-kasus yang demikian kerap terjadi bahkan ketika si perempuan belum mengetahui bahwa hari-H pernikahannya telah ditentukan.²⁶

²⁵Fitriana Utami Dewi, “Perempuan Madura”, dalam <http://fitriautamidewi.blogspot.com/2012/06/perempuan-madura.html> Diakses pada 7 Desember 2014.

²⁶Miftahol Birri, “Otonomi Perempuan Madura dalam Perkawinan”..., 58.

Hal yang menjadi unik di sini adalah fenomena belakangan di mana tidak sedikit para putra maupun putri kiai dan atau tokoh masyarakat yang justru menginisiasi pernikahannya sendiri. Tingkat pendidikan anggota keluarga serta suasana keluarga yang demokratis adalah dua hal yang sedikit banyak melahirkan fenomena tersebut. Di sisi lain, tradisi semacam ini juga mulai banyak ditemukan di kalangan luar pesantren, khususnya masyarakat perkotaan. Ditopang oleh modernisme kemudian berubahnya pola pikir masyarakat dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pola yang demikian tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Namun demikian, tradisi perjodohan tetap bertahan pada masyarakat pedesaan khususnya masyarakat agraris yang secara geografis maupun kultural dekat dengan tokoh agama dan merupakan masyarakat sosial-ekonomi menengah ke bawah. Selain ditopang oleh tetap kuatnya pengaruh kiai dalam masyarakat, berbagai cerita pernikahan atas inisiasi dari pihak mempelai yang belakangan kandas di tengah jalan juga turut memperkuat tradisi tersebut. Beberapa hal tersebut kemudian turut melanggengkan kearifan lokal masyarakat Madura yang tunduk patuh pada kiai dalam sebagian besar aspek dalam kehidupan mereka.

Betapapun tampak kurang *fair*, tradisi perjodohan yang diinisiasi kiai atau orang tua yang masih dialami sebagian besar perempuan Madura tidak jarang membawa kebaikan bagi si perempuan. Tidak sedikit perempuan yang mendapatkan suami idaman dari pernikahan yang diawaliu perjodohan dan menjalani kehidupan berkeluarga dengan kebahagiaan berlimpah.²⁷ Apalagi, konsep *tabarruk* (mengambil barokah) dari kiai dan atau orang tua juga turut membentuk pola pikir dan perilaku masing-masing pasangan dalam mengisi pernikahan. Hanya saja, tidak ada atau minimnya kesempatan untuk menentukan sikap atas rencana perjodohan hingga mengenal sang calon pendamping sebelum pertunangan

²⁷Perempuan Madura digambarkan malu-malu dan pura-pura tidak mau pada awal pernikahan akan tetapi akhirnya membina keluarga yang harmonis, seperti kata pepatah lokal, *bibir nola' ate mella'* (bibir menolak akan tetapi hati mengiyakan). Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura; Pembawaan...*, 309.

diresmikan menjadi problem tersendiri yang seakan memperburuk keadaan ketika perempuan hampir tidak bisa mengatakan 'tidak'.

Dalam masyarakat Madura yang masih memegang kuat tradisi perjodohan, perempuan secara individu memiliki kekuatan yang lebih minim untuk menyatakan penolakan baik sebelum pertunangan diresmikan atau di tengah masa pertunangan. Pihak perempuan dan keluarganya harus memiliki alasan yang benar-benar kuat untuk menggagalkan sebuah pertunangan, semisal karena si calon mempelai lelaki diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain atau melakukan hal-hal yang tidak diterima norma-norma etis masyarakat.²⁸ Jika penolakan tanpa alasan semacam itu terjadi, maka yang bersangkutan tidak hanya akan dikenai sanksi sosial, akan tetapi juga sanksi moral karena dianggap tidak mematuhi orangtua, kiai dan atau tokoh masyarakat, agama serta merusak tradisi yang telah mengakar kuat di masyarakat.²⁹ Tidak jarang dampak tersebut melebar hingga di tingkat keluarga besar sehingga seluruh anggota keluarga seolah-olah merasa ikut menanggung malu atas kejadian tersebut. Hal yang cukup mengherankan di sini adalah karena keadaan yang sama tidak terjadi pada calon mempelai laki-laki yang berinisiatif menyudahi sebuah pertunangan. Keadaan ini menjadi semacam sisa-sisa dari sistem patriarki yang meski belakangan mulai menyusut, tetap meninggalkan bekas-bekas pengaruhnya dalam masyarakat Madura. Meski demikian, ada banyak kearifan lokal yang unik dalam tradisi pertunangan di Madura yang sekaligus menunjukkan benih-benih semangat egalitarianism bagi perempuan.

²⁸Ini antara lain dialami oleh Fitriana Utami Dewi berdasarkan penurutannya sendiri. Fitriana Utami Dewi, "Perempuan Madura", dalam <http://fitrianautamidewi.blogspot.com/2012/06/perempuan-madura.html> Diakses pada 7 Desember 2014.

²⁹Miftahol Birri, "Otonomi Perempuan Madura...", hlm. 48. Lebih lanjut, inisiatif mengandaskan sebuah ikatan pertunangan dari pihak perempuan juga akan berdampak negatif pada perempuan yang bersangkutan di kemudian hari karena anggapan cacat moral sehingga masyarakat akan berpikir dua kali untuk memulai perjodohan dengan perempuan tersebut.

Perempuan Madura dalam Lembaga Pertunangan

Peresmian pertunangan pada masyarakat Madura umumnya dikemas secara seremonial sesuai dengan kesepakatan dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Dalam banyak hal, upacara pertunangan yang demikian hampir sama dengan tradisi *lamaran* pada masyarakat Jawa yang berintikan acara penyematan dan penukaran cincin serta ramah-tamah dan perkenalan awal dua keluarga besar.³⁰ Pada momen tersebut, calon mempelai biasanya menyalami satu persatu rombongan yang berkunjung sebagai tanda perkenalan dan ramah tamah ataupun untuk menyambut kedatangan dan atau mengantar pulang. Perempuan Madura yang menjalani tradisi ini umumnya tidak mengikuti seluruh bagian acara dan lebih memilih berdiam diri di kamar selain pada acara penyematan cincin yang biasanya dilakukan calon mertua perempuannya. Busana yang dikenakan si perempuan dalam acara ini seringkali merupakan pemberian (calon) tunangannya yang sengaja diberikan sebelum hari H-pertunangan untuk dipakai pada momen istimewa tersebut.

Meski sekilas tampak sama, masyarakat Madura dalam hal ini memiliki karakteristik tersendiri yang cukup membuatnya berbeda dengan masyarakat Jawa atau masyarakat lain. *Pertama* adalah perihal cincin tanda pertunangan yang hanya disematkan pada jari si perempuan. Selain berangkat dari kebiasaan, ini juga dipengaruhi doktrin agama perihal haramnya seorang laki-laki menggunakan perhiasan emas. Masyarakat Madura yang secara umum religius dan taat patuh pada hukum-hukum semacam itu umumnya tidak mau *neko-neko* bahkan *emoh* untuk menyiasatinya dengan mengganti jenis cincin untuk laki-laki (bukan dari emas) ataupun memberi cincin pada si laki-laki untuk disimpan dan bukan untuk dipakai.

Kedua adalah mengenai kunjungan dua arah. Jika masyarakat Jawa mengenal *lamaran* hanya dilakukan dengan kunjungan pihak keluarga laki-laki, maka masyarakat Madura tidak demikian. Setelah kunjungan dari pihak laki-laki, pihak

keluarga perempuan umumnya segera mengadakan kunjungan *balasan*, meskipun peresmian ikatan pertunangan hanya terjadi pada kunjungan pertama. Dalam dua kunjungan tersebut, pihak tuan rumah menyediakan makanan ringan hingga makanan berat dan sesuguhan lain sedangkan pihak yang berkunjung membawa berbagai macam oleh-oleh mulai dari makanan hingga pakaian bagi calon mempelai perempuan. Unikny, tradisi membawa pakaian yang demikian hanya dilakukan pihak keluarga laki-laki dan dilengkapi dengan kosmetik serta peralatan kecantikan lain.³¹

Pertunangan dalam masyarakat Madura tidak hanya dimaksudkan untuk meresmikan sebuah perjodohan dan sebagai jembatan menuju lembaga pernikahan, akan tetapi juga sebagai *space* bagi kedua calon mempelai untuk mengenal satu sama lain. Karena itu, tidak sedikit pasangan yang menjalani masa pertunangan dengan durasi waktu yang cukup lama utamanya jika kedua calon mempelai masih belia ketika resmi terikat dalam sebuah pertunangan. Ini juga berkait erat dengan tradisi perjodohan yang menempatkan kedua calon mempelai pada posisi belum mengenal satu sama lain. Di sisi lain, hal demikian juga menjadi semacam kompromi dari ketidakterlibatan perempuan dalam perjodohan hingga proses peresmian pertunangan. Dengan alasan dan legitimasi tersebut, dua orang yang telah terikat dalam suatu pertunangan umumnya memiliki *privilege* untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang secara umum tidak diterima oleh norma moral-etik masyarakat Madura, semisal bepergian berdua, rekreasi dan belanja berdua, saling mengunjungi rumah masing-masing pada hari raya dan lain sebagainya. Hubungan dekat dan pergaulan yang terlalu *intens* antara dua orang lajang semacam itu umumnya belum bisa diterima masyarakat Madura, akan tetapi mereka akan memberi izin khusus bagi pasangan yang telah terikat dalam sebuah pertunangan.³² Sebagian

³¹ <http://www.lontarmadura.com/pernikahan-adat-madura-2/> Diakses pada 07 Desember 2014. Bandingkan dengan <http://abdulmuhidzakia.blogspot.com/2014/05/adat-perkawinansuku-madura.html> Diakses pada 07 Desember 2014.

³² Muhammad Tanzil, "Dampak Negatif Tradisi Pertunangan bagi Perempuan Madura dalam Perspektif Budaya Madura, dalam <http://tanzilte.wordpress.com/2010/03/21/dampak-negatif-tradisi->

³⁰Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura; Pembawaan...*, 90.

masyarakat Madura belakangan melakukan otokritik terhadap kebiasaan memaklumi paradoks *legalized dating* tersebut sehingga perubahan-perubahan kecil mulai muncul dalam lembaga pertunangan meski jumlahnya belum seberapa dibanding kebiasaan *mainstream*.

Di satu sisi, kebiasaan tersebut menguntungkan perempuan Madura sebab yang bersangkutan memiliki ruang dan kesempatan untuk mengenal calon laki-laki yang kelak akan menjadi suaminya. Kesempatan demikian juga berarti ruang untuk komunikasi, saling memahami karakter masing-masing, mengetahui mimpi dan cita-cita pasangan sekaligus menceritakan keinginan-keinginan pribadi, mengetahui dan belajar berkompromi dengan kekurangan masing-masing hingga membicarakan keberlanjutan pertunangan dan atau rencana pernikahan. Namun demikian di sisi lain, kesempatan tersebut baru didapat seorang perempuan ketika dirinya telah terikat dalam sebuah pertunangan sehingga ini tampak seperti hadiah yang terlambat karena tak member banyak pilihan. Kendatipun misalnya si perempuan menemukan hal-hal yang kurang menyenangkan dari si calon suami yang tidak sesuai dengan kriteria sosok suami dambaannya dan tidak bisa ditolerir, mereka tidak bisa berbuat banyak untuk mengandaskan sebuah pertunangan sebab pertunangan bagi masyarakat Madura hampir selalu menandai suksesnya sebuah perijodohan dan atau pintu gerbang yang begitu dekat dengan pernikahan. Pertimbangan ketidakcocokan yang demikian dianggap bukan masalah serius—dengan anggapan bahwa kecocokan akan timbul seiring kebersamaan—sehingga belum bisa menjadi alasan untuk mengandaskan sebuah pertunangan.

Sementara itu bagi pasangan yang bertunangan lewat inisiatif sendiri atau perijodohan dan telah mengenal satu sama lain, lembaga pertunangan berfungsi semakin mempererat hubungan dan memastikan bahwa rencana menuju pernikahan berjalan mulus dan lancar. Karena itulah, berbagai upaya dilakukan untuk memanfaatkan sebaik mungkin masa-masa pertunangan termasuk

dengan kebiasaan seorang laki-laki memberi uang saku atau tunjangan kepada tunangannya. Tunjangan yang demikian umumnya diberikan secara suka rela dan tergantung kemampuan si calon mempelai laki-laki serta tidak ada timbal balik dari pihak perempuan.

Perempuan Madura dalam hal ini bisa dibilang diuntungkan secara fisik sebab begitu ia resmi menjadi tunangan dan atau calon istri seseorang, si calon laki-laki akan memberinya tunjangan dalam bentuk uang dan atau barang. Meski jumlah, jenis dan frekuensinya berbeda antarindividu, tunjangan yang demikian hampir menjadi kewajiban rutin menjelang hari raya Idul Fitri. Calon mempelai laki-laki dan atau keluarga biasanya memberi sejumlah uang bagi si perempuan untuk membeli baju baru dan keperluan hari raya lain. Atau jika tidak, si perempuan biasanya akan diajak ke sebuah pusat perbelanjaan dan dipersilakan membeli baju dengan model, ukuran dan warna yang ia inginkan. Baju tersebut umumnya dipakai ketika kunjungan rutin hari raya dalam rangka silaturahmi antar kedua calon mempelai. Selain dalam momen hari raya Idul Fitri, kunjungan yang demikian juga terjadi ketika salah satu dari dua keluarga calon mempelai tengah menggelar acara, hajatan atau tasyakuran yang melibatkan tetangga atau keluarga besar semisal pernikahan, aqiqah, maulid nabi, *walimah safar* ibadah haji, peringatan kematian dan lain sebagainya. Dalam momen-momen yang demikian, hampir bisa dipastikan sang tunangan akan datang berkunjung dan diperkenalkan pada keluarga besar. Kunjungan dan kehadiran tersebut kurang lebih dimaksudkan untuk semakin mengenal (kebiasaan) keluarga masing-masing setelah mengenal figur calon pendamping secara pribadi dan utamanya dimaksudkan untuk mempererat ikatan pertunangan serta memantapkan langkah semua pihak untuk menuju pernikahan.

Simpulan

Posisi perempuan Madura sebagai *prestise* sebuah keluarga sekaligus seorang laki-laki yang menjadi tunangan atau suaminya serta tradisi perijodohan

[pertunangan-bagi-perempuan-madura-dalam-perspektif-budaya-madura/](#) Diakses pada 07 Desember 2014.

yang masih hidup di masyarakat setempat adalah dua hal yang berkait demikian erat. Yang pertama meligitimasi yang kedua sedang yang kedua menopang yang pertama. Keunikan-keunikan dalam berbagai pandangan hingga kebiasaan masyarakat Madura dalam dua hal tersebut tidak hanya bertalian dengan sikap keagamaan mereka sebagai masyarakat yang religius, akan tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan menjaga bahkan menganggotakan derajat sosial dan ekonomi. Seperti halnya kearifan-kearifan lokal di daerah lain, hal-hal tersebut tidak dapat dilihat dari kaca mata benar-salah, sebab kearifan yang demikian—dengan berbagai modifikasi dan evolusi—tetap tumbuh subur dari berbagai generasi ke generasi selanjutnya dan semakin memiliki nilai legitimasi bagaimanapun bentuknya.

Ini utamanya berkait dengan adanya nilai tukar yang pantas bagi perempuan Madura setelah diharuskan menjalani berbagai kebiasaan dan tradisi dalam masyarakat yang menempatkan mereka sebagai simbol *prestise*. Kearifan-kearifan lokal yang pada perkembangannya melahirkan sikap dan tindakan serta kebiasaan masyarakat Madura seperti yang disebutkan pada bagian-bagian sebelumnya pada kenyataannya tidak selalu menempatkan perempuan Madura pada posisi subordinat atau dirugikan secara fisik maupun non-fisik. Berbagai perubahan dan cara pandang masyarakat belakangan juga turut mempertinggi daya tawar perempuan Madura baik dalam statusnya sebagai simbol *prestise* maupun sebagai pelaku tradisi perjudohan. Ruang berkespresi dan mengembangkan diri bagi perempuan Madura perlahan diperlebar dengan kesadaran untuk mendongkrak *prestise* keluarga begitu juga dengan tradisi perjudohan. Modifikasi dan langkah-langkah untuk lebih melantangkan suara dan aspirasi perempuan dalam perjudohan juga mulai tampak sebab alur hingga *ending* sebuah perjudohan hingga pertunangan atau pernikahan juga banyak ditentukan oleh perempuan yang menjalaninya.

Terlepas dari berbagai hal tersebut, beberapa PR memang masih tersisa bagi perempuan Madura secara khusus maupun masyarakat Madura

secara umum. Perihal pernikahan dini tanpa pertimbangan masalah kesehatan, iming-iming melanjutkan pendidikan setelah menikah yang tidak banyak terealisasi, ruang bagi perempuan untuk menyatakan sikap dan menentukan pilihan—perihal perjudohan, pertunangan hingga pernikahan—dengan bertanggungjawab serta anggapan negatif terhadap perempuan yang terlalu asyik mengejar karier perlu ditinjau ulang. Selain melalui advokasi hingga penyuluhan, komunikasi yang intens dengan pihak keluarga atau orang-orang yang bersangkutan dengan tradisi perjudohan juga perlu digalakkan agar didapatkan win-win solution demi kebaikan bersama. []

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Birri, Miftahol. 2009. “Otonomi Perempuan Madura dalam Perkawinan” *Skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hadi MW, Abdul. “Madura: Sejarah, Sastra dan Perempuan Seni” dalam <http://www.lontarmadura.com/madura-sejarah-sastra-dan-perempuan-seni-2/>
- Mulyadi, Achmad. “Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat”, *Jurnal Karsa STAIN Pamekasan* Vol. 19 No. 2 tahun 2011
- Sutarto, Ayu “Sekilas Tentang Masyarakat Pandalungan”, dalam <http://www.lontarmadura.com/sekilas-masyarakat-pandalungan/>.
- Rifa’i, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura; Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Diceritakan Peribahasannya*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Rozaki, Abdur. “Kepemimpinan Informal di Madura”, dalam <http://www.lontarmadura.com/kepemimpinan-informal-di-madura/>
- Tanzil, Muhammad. “Dampak Negatif Tradisi Pertunangan bagi Perempuan Madura dalam Perspektif Budaya Madura, dalam [177](http://tanziltc.wordpress.com/2010/03/21/dampak-</p></div><div data-bbox=)

- negatif-tradisi-pertunangan-bagi-perempuan-madura-dalam-perspektif-budaya-madura/
Rahman, Jamal D. “Sesisir Pisang Kiai: Sedikit tentang Kosmologi Madura”, dalam <http://www.lontarmadura.com/?s=sisir&x=0&y=0>
- Utomo, Haryo Ksatrio “Persamaan, Perbedaan dan Feminisme: Studi Kasus Konflik Sampang-Madura”, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Universitas Indonesia Jakarta vol. 16 no. 2, Desember 2012
- Wiyata, A. Latif. 2002. *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* Yogyakarta: LKiS.
- Wiyata, Latif A. 2003. *Madura yang Patuh? Kajian Antropologi mengenai Budaya Madura* Jakarta: FISIP UI
- Zubairi, Dardiri. 2013. *Rahasia Perempuan Madura; Esai-Esai Remeh Seputar Kebudayaan Madura*. Surabaya: Andhap Asor dan Al-Afkar Press.
- <http://www.lontarmadura.com/kepemimpinan-informal-di-madura/> .
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/27/058617407/Goda-Istri-Orang-Sopir-Angkot-Dibacok-di-Jalan>
- <http://www.surabayapagi.com/index.php?read~Tragedi-Sampang-Rebutan-Cewek;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962f6733ce081884f319ff9175b83e78441>
- <http://rona.metrotvnews.com/read/2014/11/03/313423/iwet-gambarkan-perempuan-madura-lewat-batik> .
- <http://www.warungbebas.com/2010/01/inilah-sifat-umum-etnis-orang-madura.html>
- <http://www.lontarmadura.com/pernikahan-adat-madura-2/>
- <http://abdulmuhidzakia.blogspot.com/2014/05/adat-perkawinansuku-madura.html>